



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Televisi merupakan salah satu media massa yang menghadirkan berita-berita terbaru, terlebih berita di bidang politik mulai dari kampanye yang dimuat di televisi, informasi perkembangan situasi politik menjelang pemilu, hingga hasil hitung cepat. Di Indonesia sendiri, konten yang disiarkan melalui televisi terdapat lembaga Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang bertugas untuk memantau dan menyaring konten-konten program yang disiarkan oleh seluruh stasiun televisi di Indonesia.

KPI Pusat (2016, para.3) mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran untuk mulai menerapkan translasi bahasa isyarat dalam program-program siarannya. Imbauan yang dikeluarkan oleh KPI tersebut didasari adanya Undang-Undang Pasal 14 Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu tentang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang diperlukan demi pengembangan pribadi dan lingkungan.

Wakil Ketua KPI Pusat, Idy Muzayyad juga mengatakan bahwa penyediaan translasi bahasa isyarat dalam program acara televisi sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas tunarungu dalam memperoleh informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab (KPI Imbau Stasiun Televisi Beri Translasi Bahasa Isyarat, 2016, para.4).

Berbicara mengenai kebijakan translasi bahasa isyarat, dalam Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 juga membahas mengenai memberi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam penyertakan penerjemah bahasa isyarat untuk memfasilitasi pemilih tunarungu sebagai mekanisme penyelenggaraan debat pasangan calon. Aturan yang harus dipatuhi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam menyelenggarakan acara debat yaitu mengenai banyaknya putaran acara debat, tema yang diambil, hingga aturan lamanya penyelenggaraan acara debat.

Gambar 1.1 Tayangan Acara Debat Pilgub Jabar 2018 di Televisi



Sumber: video.medcom.id

Tampilan translasi bahasa isyarat digunakan pertama kali oleh KPU dalam acara debat Pilpres 2014. Dalam penggunaan perdananya, tampilan penerjemah bahasa isyarat mendapat masukan dan apresiasi. Salah satu masukan yang diberikan yaitu dari Pinkan Warouw selaku salah satu pendamping penerjemah di Organisasi Gerakan Kesejahteraan Tunarungu

Indonesia (Gerkatin), yang mengatakan bahwa kaum tunarungu mengeluhkan ukuran kotak penerjemah di TV yang terlihat sebesar tutup botol saja di televisi mereka yang hanya sebesar 14 inchi (DetikNews, 2014, para.2).

Namun adanya tampilan translasi bahasa isyarat di televisi untuk pertama kali juga diapresiasi oleh beberapa organisasi kelompok tunarungu lain yang menghargai usaha KPU dalam memberikan layanan terbaik untuk masyarakat penyandang disabilitas penyandang tunarungu.

Translasi bahasa isyarat merupakan bahasa utama yang digunakan oleh masyarakat disabilitas penyandang tunarungu. Dikutip melalui Kumparan, “Pentingnya Bahasa Isyarat bagi Tunarungu” (2017, para.8) yang mengatakan bahwa dengan bahasa isyarat, kaum tunarungu akan bisa mengerti dan berkomunikasi lebih baik dengan pendengarnya. Maka dari itu penting bagi kaum tunarungu mendapatkan pelayanan yang baik khususnya mengenai translasi bahasa isyarat di televisi.

Mengingat bahwa pada tahun ini KPU akan kembali menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah di beberapa daerah secara serentak. Salah satu daerah yang menjadi pusat perhatian adalah Jawa Barat, dimana daerah ini akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dengan 4 pasangan calon untuk periode 2019-2024. Pada Pemilihan Gubernur tahun 2018 KPUD Jawa Barat akan mengadakan beberapa rangkaian acara untuk mendukung pesta demokrasi di Jawa Barat, salah

satunya adalah acara Debat Pilgub Jabar 2018 yang akan dilengkapi dengan translasi bahasa isyarat.

Selain acara debat, KPU Jawa Barat juga melakukan cara lain untuk menarik tingkat partisipasi masyarakat Jawa Barat untuk ambil bagian dalam pesta demokrasi ini, salah satunya yaitu sosialisasi. Komisioner KPU Jabar, Nina Yuningsih, mengatakan bahwa dalam sosialisasi ini akan menjelaskan tentang mekanisme Pilkada dan pencoblosan bagi penyandang disabilitas tunarungu” (Kumparan, 2018, para.2).

Dalam acara sosialisasi yang diselenggarakan, KPU mengundang Organisasi untuk Kesejahteraan Tunarungu Jawa Barat (Gerkatin) Jawa Barat sebagai tamunya. Organisasi ini cukup aktif dalam melakukan tugasnya untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas, terutama tunarungu, dalam segala bidang. Acara sosialisasi ini diadakan dengan pertimbangan banyaknya jumlah pemilih difabel tunarungu. Seperti pada tabel Rekap Data Pemilih Jabar di bawah ini:

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Gambar 1.2 Rekap Data Pemilih Difabel Jawa Barat

Rekap Data Provinsi

Show **50** entries

Search:

No	Kabupaten/Kota	Jml TPS	Jumlah Pemilih			Difabel					Total
			L	P	Total	Difabel					
						1	2	3	4	5	
1	BANDUNG	5.448	1.175.170	1.145.935	2.321.105	1.132	533	487	291	697	3.140
2	BANDUNG BARAT	2.920	582.616	572.001	1.154.617	303	231	251	124	454	1.363
3	BEKASI	3.994	918.104	919.365	1.837.469	372	263	377	145	399	1.556
4	BOGOR	7.635	1.688.399	1.605.420	3.293.819	762	372	348	156	599	2.237
5	CIAMIS	2.263	458.593	463.335	921.928	2.086	794	768	487	800	4.935
6	CIANJUR	3.921	838.825	811.049	1.649.874	641	378	364	170	284	1.837
7	CIREBON	3.650	830.271	817.753	1.648.024	663	345	442	259	356	2.065
8	GARUT	4.718	933.226	902.186	1.835.412	660	453	506	282	638	2.539
9	INDRAMAYU	2.841	658.960	667.811	1.326.771	576	438	380	236	699	2.329
10	KARAWANG	3.019	798.787	791.466	1.590.283	472	358	316	181	445	1.772
11	KOTA BANDUNG	4.412	821.944	828.389	1.650.333	438	417	250	172	880	2.157
12	KOTA BANJAR	322	71.113	73.012	144.125	160	114	124	106	106	610
13	KOTA DEKAT	3.030	689.505	693.513	1.383.018	200	165	132	57	386	940
14	KOTA BOGOR	1.785	337.069	334.751	671.820	177	122	133	69	332	833
15	KOTA CIMAHI	983	180.494	183.919	364.413	343	133	175	195	216	1.062
16	KOTA CIREBON	579	113.504	116.432	229.936	163	100	148	120	181	712
17	KOTA DEPOK	3.302	574.601	582.959	1.157.560	377	143	241	207	454	1.422
18	KOTA SUKABUMI	527	111.226	112.816	224.042	162	110	128	59	115	574
19	KOTA TASIKMALAYA	1.161	238.984	235.087	474.071	257	211	181	118	218	985
20	KUNINGAN	2.005	422.638	416.044	838.682	796	510	558	411	799	3.074
21	MAJALENGA	2.192	473.052	480.001	953.053	582	453	495	271	609	2.410
22	PANGANDARAN	717	154.384	157.423	311.807	720	249	223	152	259	1.603
23	PURWAKARTA	1.491	328.594	325.559	654.153	310	209	192	90	308	1.109
24	SUBANG	2.852	545.620	561.151	1.106.771	604	413	373	190	525	2.105
25	SUKABUMI	4.118	908.705	893.458	1.802.163	850	788	624	269	662	3.193
26	SUMEDANG	2.026	417.191	419.638	836.829	422	347	348	207	467	1.791
27	TASIKMALAYA	3.021	669.721	656.531	1.326.252	862	640	648	316	852	3.318
TOTAL		74.942	15.941.296	15.767.034	31.708.330	15.090	9.289	9.212	5.340	12.740	51.671

Showing 1 to 27 of 27 entries

Keterangan Difabel:
 1. Tunas Daksa
 2. Tunas Netra
 3. Tunas Rungtu/Wicara
 4. Tunas Grahita
 5. Disabilitas lainnya

Sumber: infopemilu.kpu.go.id

Pemilih tunarungu yang telah terdaftar ada sebanyak 9.212 orang pemilih. Jumlah pemilih difabel tunarungu di Jawa Barat merupakan yang terbanyak ke-3 setelah pemilih difabel tunadaksa dan tunanetra, yaitu sebanyak 15.090 dan 9.289 orang.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, peneliti tertarik untuk membahas topik penelitian mengenai tingkat terpaan acara debat Pilgub Jabar 2018 di televisi terhadap tingkat partisipasi pemilih tunarungu. Hal tersebut dikarenakan melihat jumlah populasi pemilih

penyandang tunarungu di Jawa Barat yang cukup besar, serta peran televisi sebagai media yang memiliki andil dalam proses pemilu sebagai bagian dari upaya meningkatkan tingkat partisipasi kaum tunarungu dalam proses pesta demokrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Besarnya jumlah pemilih tunarungu di Jawa Barat menjadikan KPUD Jawa Barat memberikan fasilitas translasi bahasa isyarat khususnya pada acara Debat Pilgub Jawa Barat. Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih baik bagi pemilih tunarungu khususnya informasi mengenai Pilgub Jawa Barat.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat terpaan acara Debat Pilgub Jabar 2018 di televisi terhadap tingkat partisipasi politik pemilih tunarungu.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh tingkat terpaan acara Debat Pilgub Jabar 2018 di televisi terhadap tingkat partisipasi politik pemilih tunarungu.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat terpaan acara Debat Pilgub Jabar 2018 di televisi terhadap tingkat partisipasi politik pemilih tunarungu.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan akademis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan tentang media dan retorika sebagai persuasi melalui kampanye politik di media televisi serta media sosial lainnya

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada lembaga/ instansi media mengenai isi berita terkait tingkat terpaan acara debat melalui media televisi terhadap adanya tingkat partisipasi politik masyarakat.

